



Mekanisme *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton (Tinjauan Deskriptif)

INFO PENULIS

Hado
Universitas Sulawesi Tenggara
hasinaunsultra@gmail.com

Vickky Anggara Ilham
Universitas Sulawesi Tenggara
vickkyanggara@gmail.com

Aldinoman
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara
dino.aldinoman23@gmail.com

Maudhy Satyadharma
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
maudhymaudhy@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 3, Desember 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hado, Ilham, V. A., Aldinoman, & Satyadharma, M. (2024). Mekanisme Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton (Tinjauan Deskriptif) . *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1401-1409.

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh peran strategis yang dimiliki oleh Pelabuhan Nambo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme Collaborative Governance dalam alam mendukung distribusi barang, khususnya Aspal Buton, serta menjadi pendorong utama perekonomian daerah. Dalam pengelolaannya, pelabuhan melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, perusahaan pelayaran, pengusaha logistik, dan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton, dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dinamika kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Buton (Pelabuhan Nambo) dan di Kota Kendari dari Bulan Juni-September 2024. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Mekanisme *Collaborative Governance* sangat diperlukan dalam pengelolaan Pelabuhan Nambo sehingga akan mendorong penyelenggaraan transportasi dan bongkar muat logistic menjadi lebih efisien dan efektif serta meningkatnya kinerja pelabuhan itu sendiri.

Kata kunci: Collaborative Governance, Pelabuhan, Pelabuhan Nambo, Pengembangan Wilayah

Abstract

This research is motivated by the strategic role of Nambo Port. This research aims to analyze the implementation of the Collaborative Governance mechanism in nature to support the distribution of goods, especially Buton Asphalt, and to become the main driver of the regional economy. In its management, the port involves various stakeholders, such as local governments, port managers, shipping companies, logistics entrepreneurs, and the local community. This study aims to analyze the implementation of the Collaborative Governance mechanism in the management of Nambo Port, Buton Regency, with a descriptive approach to describe the dynamics of collaboration between the various parties involved. This type of research is a qualitative descriptive analysis with data collection from interviews, observations and documentation studies. The research was conducted in Buton Regency (Nambo Port) and in Kendari City from June-September 2024. Based on the results of the research and discussion carried out, it can be concluded that the Implementation of the Collaborative Governance Mechanism is very much needed in the management of Nambo Port so that it will encourage the implementation of transportation and loading and unloading of logistics to be more efficient and effective and increase the performance of the port itself.

Key Words: Collaborative Governance, Port, Nambo Port, Regional Development

A. Pendahuluan

Pembangunan merujuk pada serangkaian perubahan yang dilakukan dengan usaha yang sadar dan direncanakan (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat bergantung pada tercapainya penyediaan infrastruktur. Infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan adalah infrastruktur transportasi. Pengembangan infrastruktur transportasi perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat berdampak dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau publik. (Adisasmitha, 2012.; Asriyati et al., 2023; Rojas, 2018) menyatakan bahwa transportasi memegang fungsi yang sangat strategis dalam menunjang dan mendorong pembangunan, transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian. Transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sementara kegiatan masyarakat sehari-hari, bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan yang beraneka ragam.

(Sani, 2010) meyakini bahwa fungsi transportasi hari ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena berbagai alasan diantaranya :

1. Penggerak pembangunan. Sebuah daerah terpencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam apabila tidak terdapat lalu lintas dan angkutan ke daerah tersebut maka akan menjadikan daerah tersebut terpencil, sehingga fungsi angkutan bagi daerah tersebut adalah menggerakkan roda pembangunan.
2. Melayani pada kegiatan nyata ekonomi yang sudah berjalan. Hal tersebut dapat diuraikan bahwa transportasi dibutuhkan dalam rangka menunjang pergerakan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain.

Keyakinan lain dijelaskan oleh Jinca (2009) yang menyatakan fungsi dan manfaat dari transportasi bagi masyarakat diantaranya :

1. Membuka suatu wilayah dari isolasi.
2. Mendorong peningkatan aktivitas yang berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
3. Memudahkan dalam akses teknologi dan fasilitas sosial
4. Meningkatkan mobilitas dan kontak sosial antar penduduk.

Salah satu moda transportasi adalah transportasi laut. Kramadibrata (Putra & Djalante, 2016) menyatakan bahwa transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya angkut banyak, dan biaya relatif murah. Guna menunjang perdagangan dan lalulintas muatan, pelabuhan diciptakan

sebagai titik simpul perpindahan muatan barang dimana kapal dapat berlabuh, bersandar, melakukan bongkar muat barang dan penerusan ke daerah lainnya.

Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam sektor transportasi laut. Dengan adanya fasilitas ini, perjalanan antar wilayah menjadi lebih cepat, yang sangat mendukung kemajuan ekonomi suatu daerah. Produk-produk konsumsi dari pusat produksi dapat dipasarkan dengan lebih efisien dan lancar. Di sisi lain, dalam aspek ekonomi, pelabuhan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah yang terisolasi, terutama wilayah pesisir, di mana akses darat sulit dilakukan dengan baik (Putra & Djalante, 2016).

Pengelolaan Pelabuhan Nambo sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan lainnya saat ini sudah tidak bisa dilaksanakan secara parsial, sendiri-sendiri dan tidak melibatkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak karena cenderung tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan (Akbar, 2021; Satyadharma & Susanti, 2024; Sinaga, 2021). Hal itu dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam *Governance* yang mendorong pembagian peran pemerintah kepada pihak lainnya sehingga akan melahirkan sinergitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang menyempurnakan konsep *governance* yaitu *Collaborative Governance* (Satyadharma & Susanti, 2024).

Peran pelabuhan yang penting tersebut seharusnya dapat dimainkan oleh Pelabuhan Nambo Lawele di Kabupaten Buton yang hari ini dijadikan pilot project pengembangan dan pemanfaatan Asbuton (Aldinoman, 2023). Hanya observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa fungsi yang dijalankan belum maksimal karena Pengelolaan yang berjalan secara terpisah, tanpa melibatkan pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga Pemkab Buton, menghambat efisiensi operasional pelabuhan. Padahal, pengelolaan yang terintegrasi dan kolaboratif sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan pemanfaatan pelabuhan secara optimal. Dalam konteks ini, penerapan *Collaborative Governance* sangat dibutuhkan. Model ini mengedepankan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan sektor swasta, untuk merancang dan melaksanakan kebijakan secara bersama-sama.

Wanna (Yasinta, 2020) menyatakan bahwa beberapa jenis hubungan kolaboratif diantaranya sebagai berikut :

1. Kolaborasi didalam pemerintahan yang melibatkan berbagai agen dan pemain
2. Kolaborasi antara pemerintah, melibatkan instansi dari berbagai yuridiksi.
3. Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa
4. Kolaborasi antara pemerintah dan warga negara.

Roberts, Van Wyk dan Dhanpat (Akbar, 2021) meyakini bahwa lima kunci dalam penyelenggaraan mekanisme *Collaborative Governance* terdiri dari tujuan umum, mutualitas, lingkungan yang memungkinkan, kepercayaan dan karakteristik pribadi tertentu. Pendapat lain diyakini oleh Huxham dan Vangen (Akbar, 2021) terdapat enam hal dalam proses *Collaborative Governance* diantaranya : *Managing aims, goals atau objective ; Compromise ; Communication; Democracy and equality; Power and trust ; Determination, commitment and stamina.*

(Ansell & Gash, 2008) meyakini bahwa proses kolaborasi dan mekanisme *Collaborative Governance* akan berjalan dengan baik jika terdiri dari berbagai komponen diantaranya dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses kolaborasi, pemahaman bersama dan adanya dampak sementara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diurai diatas serta masih sedikitnya pembahasan mengenai mekanisme *Collaborative Governance* dalam aspek pemerintahan di wilayah lokasi penelitian maka perlu dilakukan penelitian yang mengambil topik yaitu Mekanisme *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana dinyatakan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan masalah mengenai program data/atau pengalaman yang dialami oleh peneliti. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Buton (Pelabuhan Nambo) dan di Kota Kendari dari Bulan Juni-Agustus 2024. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yaitu informan yang dipilih karena pertimbangan tertentu yaitu yang memahami

mengenai pengelolaan Pelabuhan Nambo serta peran yang dapat dijalankan dalam mendorong distribusi khususnya Aspal Buton yang menjadi sumber PAD di Kabupaten Buton.

Adapun informan penelitian ini akan diuraikan pada Tabel 2 berikut

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama Informan penelitian	Jabatan
1	Drs. La Ode Mustari, M.Si	Pj. Bupati Buton (Agustus 2023- Juni 2024)
2	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Dr. Buzhardiman, ST.,MS	Analisis Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Muh. Jalil Abdul Razak, SH.,ME	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dishub Sultra
5	Zahidi, S.Ip	Kepala Seksi Keselamatan Dishub Kab. Buton
6	Ahmad Darni	Kepala Unit Wilker Pelabuhan Nambo Lawele KSOP Kelas II Baubau

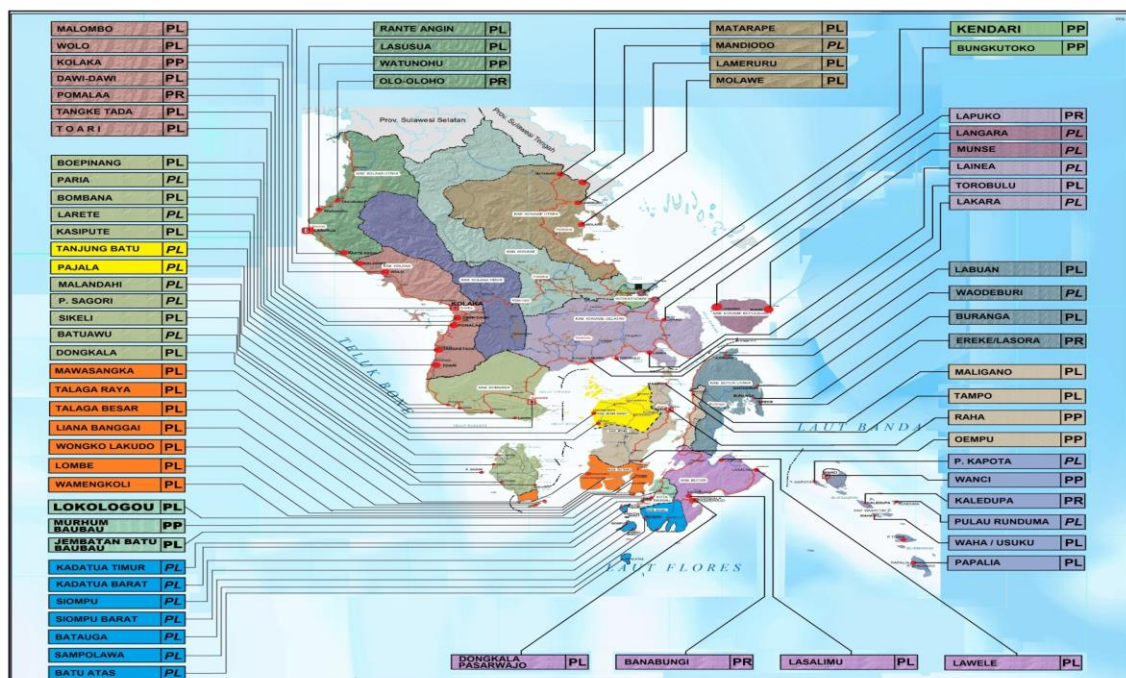
Sumber : Data Primer (2024)

C. Hasil dan Pembahasan

Pelabuhan Nambo merupakan nama pelabuhan yang baru disematkan atau diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk dirubah sebagaimana dalam Keputusan Hierarki Kepelabuhanan No. 432 Tahun 2017 adalah Pelabuhan Lawele. Pelabuhan ini mulai dibangun di tahun 2012 hingga rampung di tahun 2013.

Berdasarkan data Rencana Induk Pengembangan Nasional (RIPN), Pelabuhan Nambo (Wilker Lawele) merupakan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) yang akan direncanakan menjadi pelabuhan Regional (PR) sebagaimana terlihat pada Gambar 1

Pelabuhan ini terletak di Kabupaten Buton Desa Nambo Kecamatan Lasalimu. Pelabuhan ini berada pada kewenangan UPP Kelas I Pelabuhan Baubau. Saat ini Pelabuhan Nambo berstatus sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal dan juga difungsikan sebagai prasarana mendukung distribusi produk Asbuton (CPHMA) dalam bentuk karung ukuran 10 – 50 kg.



Gambar 1 Pelabuhan Nambo dalam Rencana Induk Pengembangan Nasional

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2023)

Pelabuhan ini dibangun sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Buton untuk mendukung kegiatan bongkar muat aspal buton yang menjadi potensi sumber daya alam yang melimpah. Pelabuhan Nambo diusulkan karena hierarki posisi wilayah setelah pemekaran wilayah pelabuhan Lawele berada di Desa Nambo (Aldinoman, 2023).

Hasil observasi dan pengukuran menemukan bahwa pelabuhan Nambo berada kurang lebih 200 meter dari area pemukiman di Desa Nambo. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menemukan bahwa wilayah di belakang area Pelabuhan Lawele merupakan area hutan produksi serta ada bagian pelabuhan yang bersinggungan langsung dengan wilayah hutan mangrove. Area beaching yang terdapat di dekat Pelabuhan Nambo merupakan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



Gambar 2 Kondisi Eksisting Pelabuhan Nambo
Sumber : Data Primer (2024)

Besarnya dampak yang bisa dihasilkan oleh Pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur transportasi dalam mendukung suatu daerah telah dijelaskan oleh banyak penelitian yaitu, (Astija & Puspitasari, 2017; Damopolii, 2009; Djaenuddin et al., 2021; Yudhistira & Sofiyandi, 2017) dimana dapat disimpulkan bahwa pelabuhan itu berperan penting dalam pengangkutan barang dari dan keluar suatu daerah sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi pada wilayah tersebut.

Hal tersebut diyakini oleh Pemkab Buton dan Pemprov Sulawesi Tenggara terkait dengan potensi Aspal Buton yang dapat mendukung pengembangan wilayah dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton dan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa informan penelitian.

Potensi Aspal Buton ini juga mendasari lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Buton yaitu terwujudnya masyarakat Industri dan berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025.

Hasil penelitian yang dilaksanakan baik berupa wawancara mendalam pada beberapa informan penelitian dan observasi menemukan bahwa potensi distribusi aspal buton belum sepenuhnya dilaksanakan di Pelabuhan Nambo Lawele. Salah satu hal yang mengemuka yang digali dalam penelitian ini masih berjalan sendiri-sendiri pengelolaan Pelabuhan Nambo yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan dengan Unit Pengelola Pelabuhan Nambo, namun kedepannya aset ini akan diserahkan ke pemerintah daerah setempat (Pemkab Buton), namun Pemprov Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan pengelolaan laut di Pelabuhan Nambo paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Fenomena pengelolaan pelabuhan Nambo Lawele yang terkesan berjalan sendiri-sendiri tentu saja sudah harus menjadi perhatian bersama dan menjadikan hal ini sebagai pengelolaan secara bersama-sama dengan penerapan metode *Collaborative Governance* sehingga peran dan

fungsi Pelabuhan Nambo tentu akan dirasakan berdampak positif tidak hanya masyarakat di Kabupaten Buton namun juga Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mekanisme *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo di Kabupaten Buton dapat diterapkan dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi berjalan efektif pada berbagai pihak yang terkait sehingga potensi maksimal dari pelabuhan ini dapat dirasakan, sehingga pada konteks ini perlu dikedepankan kerjasama antara pihak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemkab Buton), pihak masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan masyarakat.

Penelitian ini meyakini bahwa perlu diintegrasikan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak sehingga peran dari Pelabuhan Nambo dapat maksimal karena berjalannya pengelolaan secara terpadu berbagai stakeholder didalamnya, yang tentu harus dilakukan dengan berbagai komponen sebagai berikut :

1. Dialog antar muka

Temuan penelitian menemukan bahwa dialog antar muka ini belum intens digelar padahal salah satu komponen penting dalam berjalannya kolaborasi (*Collaborative Governance*) jika terus menerus dilakukan dialog antar muka. Hal ini diyakini oleh (Ansell & Gash, 2008) yang menyatakan bahwa dialog antar muka sangat penting dalam mendorong terjadinya kesamaan pendapat dan persepsi mengenai pengelolaan pelabuhan Nambo.

Dialog yang terus-menerus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan berada dalam satu kesepahaman tentang prioritas dan tujuan bersama untuk meningkatkan operasional pelabuhan. Proses ini mencakup komunikasi yang terbuka dan transparan, di mana setiap pihak—baik pemerintah, pengelola pelabuhan, perusahaan pelayaran, pengusaha logistik, maupun masyarakat—dapat menyampaikan pendapat, kekhawatiran, dan kebutuhan mereka. Dengan adanya dialog yang terstruktur dan berkelanjutan, semua pihak dapat bekerja sama dengan pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dialog ini sangat membantu dalam meminimalkan potensi konflik yang mungkin muncul karena perbedaan kepentingan antara stakeholder yang terlibat. Misalnya, perusahaan pelayaran mungkin memiliki kebutuhan operasional yang berbeda dari pihak pengelola pelabuhan atau pemerintah daerah. Tanpa komunikasi yang baik, perbedaan ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Namun, dengan adanya dialog yang terbuka, semua pihak dapat saling mendengarkan dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Gazley dan Budney (Dwiyanto, 2022) dan Satyadharna dan Susanti (2024) bahwa rapat-rapat dan semacamnya adalah bagian dari bentuk dialogi antar muka yang setidaknya dilakukan atau melibatkan dua atau lebih stakeholder dan melibatkan kerjasama jangka panjang diantara stakeholders tersebut.

2. Membangun kepercayaan

Komponen berikutnya yang akan dihasilkan jika mekanisme *Collaborative Governance* dilaksanakan tentu adanya kepercayaan diantara stakeholder tersebut. Proses terbentuknya kepercayaan ini dapat dilihat dalam pengelolaan yang transparan, komunikasi yang terbuka, dan saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat dan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pelabuhan Nambo sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang akan menghasilkan kerjasama yang saling menghargai satu sama lain dan berdampak pada kinerja Pelabuhan Nambo yang semakin baik dan berperan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Buton pada khususnya dan juga meningkatkan distribusi barang-barang khususnya Aspal Buton.

Kepercayaan yang dibangun melalui komitmen bersama untuk memajukan pelabuhan Nambo memperkuat sinergi, sehingga operasional pelabuhan menjadi lebih lancar. Pihak-pihak yang terlibat dapat saling mengandalkan dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kepercayaan yang terbangun melalui mekanisme *Collaborative Governance* akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, tidak hanya dalam hal kinerja Pelabuhan Nambo, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Buton. Ketika kinerja pelabuhan semakin baik dan distribusi barang, khususnya Aspal Buton, semakin lancar, daerah ini akan semakin dikenal sebagai pusat perdagangan yang efisien dan terpercaya. Dengan demikian, Pelabuhan Nambo akan menjadi salah satu pilar utama

dalam pengembangan wilayah, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuka peluang untuk industri baru.

Unsur membangun kepercayaan ini juga diyakini oleh (Ansell & Gash, 2008) yang menyatakan bahwa membangun kepercayaan adalah syarat dalam membangun kolaborasi yang solid dan kuat diantara *stakeholder* terkait. Tentu dalam membangun kepercayaan yang kuat itu tidak berjalan dengan mudah karena akan sangat membutuhkan waktu yang panjang serta adanya komunikasi yang baik dan dilakukan secara terus menerus dalam suatu proses kolaborasi.

3. Komitmen pada proses kolaborasi

Suatu kolaborasi memerlukan komitmen bersama diantara *stakeholder* tersebut. Komitmen ini menjadi landasan utama agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (Dewi, N. L. Y. (2019). Pengelolaan transportasi dan bongkar muat di Pelabuhan Nambo menunjukkan komitmen yang kuat pada proses kolaborasi, di mana setiap pihak sepakat untuk berinvestasi dalam hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Komitmen ini terlihat dalam upaya bersama untuk membangun infrastruktur pelabuhan, meningkatkan fasilitas pelayanan, serta memperbaiki sistem operasional yang ada. Semua pihak memahami bahwa keberhasilan pelabuhan bukan hanya bergantung pada satu pihak saja, tetapi hasil dari kerjasama yang berkelanjutan. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan di Pelabuhan Nambo tentu akan merasakan hasilnya jika proses kolaborasi ini juga dilengkapi dengan unsur berkomitmen pada proses kolaborasi tersebut.

Pentingnya komitmen pada proses kolaborasi dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas operasional yang ada. Pelabuhan adalah sebuah sistem yang saling terhubung dengan banyak faktor seperti manajemen pelabuhan, layanan kapal, pengelolaan logistik, peraturan pemerintah, dampak terhadap wilayah sekitar, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut akan saling mempengaruhi kinerja dan operasional pelabuhan Nambo sehingga tanpa adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, maka tujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi operasional pelabuhan, peran pelabuhan dalam mendistribusi Aspal Buton dan barang lainnya, menjaga keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi laut serta keberlanjutan pengelolaan di Pelabuhan Nambo akan sulit terwujud.

4. Pemahaman bersama

Salah satu hasil utama jika sudah dilakukannya kolaborasi di Pelabuhan Nambo adalah pemahaman bersama mengenai visi dan tujuan pengelolaan pelabuhan. Semua pihak yang terlibat memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, meminimalkan dampak lingkungan, dan menjaga keselamatan di pelabuhan. Dengan pemahaman yang sama, setiap keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.

Pemahaman bersama dalam kolaborasi di Pelabuhan Nambo memiliki peran yang sangat penting karena merupakan dasar untuk tercapainya tujuan bersama secara efisien dan efektif. Pelabuhan Nambo, sebagai titik penting dalam pengelolaan transportasi laut dan distribusi barang, melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda-beda, seperti pemerintah, pengelola pelabuhan, perusahaan pelayaran, pengusaha logistik, dan masyarakat sekitar. Tanpa pemahaman bersama, setiap pihak bisa memiliki persepsi yang berbeda mengenai prioritas dan langkah-langkah yang perlu diambil, yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan. Hal ini menegaskan konsep (Ansell & Gash, 2008) bahwa para instansi yang terkait dalam pengelolaan pelabuhan Nambo jika memiliki satu visi, misi dan tujuan tentu akan mampu meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi.

5. Dampak sementara

Dampak sementara yang akan terjadi jika terlaksana proses kolaborasi tersebut akan menghasilkan umpan balik yang positif. Dalam jangka pendek, jika upaya kolaboratif dilaksanakan dengan baik, maka dampak sementara yang dapat dilihat dalam bentuk peningkatan aktivitas bongkar muat dan peningkatan arus barang yang lebih efisien.

Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan Pelabuhan Nambo Lawele sendiri saat ini dalam kegiatan operasional didominasi oleh aktivitas

bongkar muat aspal dengan persentase 70 persen, yang akan diuraikan dalam Tabel 1 berikut

Tabel 1 Persentase Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan 5 Tahun terakhir (2017-2022)

No	Aktivitas Bongkar Muat	Persentase (%)
1	Aspal	70
2	Barang Industri (Semen, Besi, Pipa, dll)	20
3	Komoditi perikanan	2,5
4	Komoditi perkebunan	2,5
5	Komoditi pertanian	1
6	Jasa Angkutan Pelayaran	4

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (2023)

Temuan penelitian yang dilakukan jika proses kolaborasi dalam pengelolaan Pelabuhan Nambo ini berjalan dengan baik tentu akan memaksimalkan distribusi Aspal Buton keluar wilayah serta berdampak dengan baik pada Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton serta diyakini akan berdampak *multiplier effect* pada sektor lain pada wilayah Kabupaten Buton.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Nambo saat ini belum optimal berperan terutama dalam mendukung distribusi Aspal Buton dan produk yang dihasilkan di Kabupaten Buton dimana terlihat bahwa pengelolaan masih berjalan parsial dan belum terpadu. Hal itu membutuhkan suatu kerjasama dalam bentuk penerapan Mekanisme *Collaborative Governance* yang diyakini akan mendorong penyelenggaraan transportasi dan bongkar muat logistic menjadi lebih efisien dan efektif serta meningkatnya kinerja pelabuhan itu sendiri. Penerapan kolaborasi tersebut harus didukung dengan beberapa komponen diantaranya seringnya dilakukan dialog antar muka, membangun kepercayaan, diperlukannya komitmen pada proses kolaborasi, adanya pemahaman bersama dan akan dihasilkannya dampak sementara dari hasil kolaborasi tersebut.

E. Ucapan Terimakasih

Dalam kesempatan ini kami berterimakasih atas segala informan yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

F. Referensi

- Adisasmita, S. A. (n.d.). *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Graha Ilmu.
- Akbar, A. A. (2021). *Collaborative Governance Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Aldinoman. (2023). *Evaluasi Kinerja Pelabuhan Nambo Wilker Lawele Sebagai Simpul Utama Distribusi Aspal Buton*. Universitas Halu Oleo.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asriyati, Hado, Sufrianto, & Satyadharma, M. (2023). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Sultra Civil Engineering Journal (SCiEJ)*, 4(2), 67–76.
- Astija, S., & Puspitasari, A. Y. (2017). Pengaruh Pelabuhan Sebagai Simpul Pertumbuhan Terhadap Pengembangan Wilayah Studi Kasus : Pelabuhan Paelangkuta Nusantara Raha. *Jurnal Planologi*, 14(1), 16–28.
- Damopolii, D. W. (2009). *Peran Pelabuhan Labuan Uki Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow*. Universitas Diponegoro.
- Djaenuddin, D., Manaf, M., & Aksa, K. (2021). Pengembangan Pelabuhan Mattoanging Dalam

- Mendukung Pengembangan Wilayah Sekitarnya. *Journal of Urban Planning Studies (JUPS)*, 1(3), 231-246.
- Putra, A. A., & Djalante, S. (2016). Pengembangan Insfratraktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 6(1), 433-443.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rojas, A. R. (2018). SWOT Analysis of Specialised and Transport Facilities In The Logistics Infrastructure of Mexico 2013-2018. *World Review of Intermodal Transportation Research*, 7(2), 147-167.
- Sani, Z. (2010). *Transportasi: Suatu Pengantar*. Universitas Indonesia (UIPress).
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1-14.
- Sinaga, R. M. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.
- Yudhistira, M., & Sofiyandi, Y. (2017). Seaport Status, Port Access, and Regional Economic Development in Indonesia. *Marit Econ Logist*, 20, 549-568.